

KOMISI III

Radikalisme Jangan
Dijadikan Pengalihan Isu

KOMISI VI

PKS Desak Reformasi
Regulasi Impor

KOMISI VIII

Menag Diharapkan
Sejukkan Suasana

KOMISI X

Kegiatan Kepariwisataaan
Harus Libatkan Warga
Sekitar

MKD

Habib Aboe Ajak
Anggota DPR Jaga
Wibawa Parlemen

TUNDA KENAIKAN IURAN BPJS!





IURAN BPJS BELUM SAATNYA DINAIKKAN

Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Naiknya BPJS Kesehatan Hingga 100 %, Sangat Memberatkan Rakyat

Jakarta (30/10) — Pemerintah melalui presiden Jokowi, secara resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan, untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari sekarang.

Kenaikan iuran BPJS hingga 100% yang berlaku awal 2020 mendatang, membuat khawatir anggota DPR RI komisi IX Adang Sudrajat.

Adang Sudrajat mengatakan pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019. Alasannya untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan sehingga dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Ini kebijakan tidak masuk akal. Pemerintah menghitung, kenaikan angka iuran itu bukan satuan yang kelihatan tidak memberatkan. Tapi mestinya menghitung faktor pengali jumlah keluarga. Dalam Pasal 34 Perpres

75/2019, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan. Kita mengetahui, keluarga yang belum beruntung ekonominya, sangat berat pada iuran BPJS saat ini sehingga banyak menunggak. Untuk angka Rp16.500,- kali lima orang asumsinya anaknya tiga, menjadi Rp 82.500,- akan semakin memberatkan”, urai Politisi PKS ini.

Pada peserta iuran BPJS kelas I, lanjut adang, kenaikannya semakin drastis. Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak 100% dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Ini berlaku per 1 Januari 2020.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa dalam jangka pendek, BPJS memang perlu diselamatkan cash flow nya. Penyelamatan BPJS yang sudah mulai skarat ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menunjukkan kreativitas dari mana sumber cash nya. Kemampuan menyediakan cashflow

Masyarakat mestinya diberikan ruang yang lebih nyaman dalam berkehidupan. Ini malah di berikan beban, dan semakin menjauh dari kesejahteraan

dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

Foto : Republik



penyelamatan BPJS tanpa merepotkan rakyat adalah yang paling tepat. Kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah akan menunjukkan kualitas pemerintah sebagai pembil kebijakan.

Kenaikan iuran BPJS ini, lanjut dia, pemerintah melakukan dengan cara pukul rata tanpa seleksi yang pantas. Ada banyak peserta mandiri yang sebenarnya sangat tidak mampu untuk membayar iuran, tetapi tidak bisa dimasukkan dalam PBI. Puluhan ribu buruh ter-PHK tidak bisa mengurus SKTM karena tinggal di perumahan, walaupun faktanya

mereka sudah terPHK lebih dari 6 bulan bahkan ada yang lebih dari 4 tahun belum punya pekerjaan tetap.

Dan hal penting lagi menurut Adang, belum ada keterbukaan komponen biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh BPJS. Dugaan saat ini justru biaya dari PBI yang dipakai untuk mensubsidi penyakit-penyakit yang dialami orang kaya. Keterbukaan ini yang perlu disampaikan ke publik sehingga semua eksekusi kebijakan ini dapat dilakukan secara adil untuk rakyat.

“BPJS ini kan sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah

untuk menjamin hak akses masyarakat pada fasilitas kesehatan yang ada. Sebaiknya dapat mengkaji ulang kebijakan kenaikan BPJS ini. Masyarakat mestinya diberikan ruang yang lebih nyaman dalam berkehidupan. Ini malah di berikan beban, dan semakin menjauh dari kesejahteraan. Sebaiknya ketika pemerintah mau menaikkan iuran BPJS, lebih dulu tingkatkan perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan peningkatan daya beli masyarakat”, tutup Adang Sudrajat.

Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat.

Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Jakarta (30/10) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Praseptyani menyampaikan kegundahannya atas naiknya iuran BPJS tanpa konsultasi dengan DPR. “Ini kado pahit pelantikan buat rakyat yang sedang sekarat, menanggung beban berat,” ujar Netty di Senayan, usai menghadiri pelantikan pimpinan Komisi IX DPR RI, Rabu (30/10).

Menurut Netty, “September lalu DPR telah menyatakan penolakan usulan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS peserta mandiri. Pemerintah diminta untuk cleansing data kepesertaan dan mencari cara lain untuk menutup defisit BPJS. Lho, kok, langsung naik. Seperti mencari jalan pintas saja atas defisit BPJS?”

Seolah tidak mengindahkan keputusan DPR, Presiden Jokowi pada 30 Oktober 2019 mengeluarkan Perpres No 75 tahun 2019 yang menjadi legitimasi bagi kebijakan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Dalam Perpres

BERITA FRAKSI PKS

Fraksi.pks.id | Kamis 31 Oktober 2019

f Fraksi PKS DPR RI

c fraksipksdprri

t @fpksdprri

fraksi.pks.id



Naiknya Iuran BPJS, Kado Pahit Pelantikan Presiden Buat Rakyat

tersebut dirinci bahwa kenaikan iuran untuk peserta mandiri yang berlaku mulai Januari 2020 adalah sebagai berikut: kelas III dari 24.000 menjadi 42.000, kelas II dari 51.000 menjadi 110.000 dan kelas I dari 81.000 menjadi 160.000. Sedangkan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung negara, kenaikannya dari 24.000 menjadi 42.000 dan dihitung per Agustus 2019. Secara hitungan, kenaikan tersebut mendekati 100%.

Menurut Netty, kenaikan iuran BPJS tanpa adanya proses pembenahan dan pemilahan data kepesertaan dapat dipastikan akan membebani masyarakat. “Beranakah BPJS menjamin bahwa seluruh peserta PBI itu memang orang yang berhak menerima? Sebaliknya, sekitar tiga puluh dua juta yang didata sebagai peserta mandiri, yang dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah, yang 50%-nya menanggung iuran itu, benarkah memiliki kemampuan untuk membayar?” tanya Netty mengutip data jumlah PBPB yang disebutkan Wakil Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Netty berani mempertanyakan itu karena dalam



Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Netty Praseptyani, M.Si (Foto : Erwinsyah / Humas FPKS)

pengalaman lapangannya sebagai Ketua Team Penggerak PKK Jawa Barat selama 10 tahun, ia banyak mengadvokasi kasus rakyat yang sakit dan tidak bisa mendapat layanan BPJS karena menunggak iuran sebagai peserta mandiri.

“Bayangan bagaimana seorang tukang gorengan yang istrinya jadi buruh cuci, anaknya tiga, harus membayar BPJS lebih dari dua ratus ribu setiap bulan. Padahal belum tentu juga mereka datang ke faskes kalau sakit.” ujar Netty.

Netty mengingatkan

bahwa penyediaan layanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah pada rakyatnya. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan.

“Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. BPJS defisit, iuran naik. PLN rugi, tarif naik. Pertamina jebol anggaran, gas dan bahan bakar naik. Wah, enak dong jadi pemerintah. Dimana keberpihakan pada rakyat.” ujar

Netty getir.

Netty menggarisbawahi pentingnya pemerintah membuat skala prioritas dan pentahapan dalam memandang masalah ini. Saat ini, kata Netty, yang paling emergency adalah bagaimana menyelamatkan hidup rumah sakit yang terancam henti nafas akibat tanggakan BPJS yang bila rumah sakit berhenti operasional maka rakyat akan kehilangan tempat pelayanan,

“BPJS harus segera membayar rumah sakit agar tidak collaps dan terhindar dari

merumahkan karyawan, termasuk dokter dan tenaga paramedis. Rumah sakit kan harus melunasi hutangnya di vendor obat dan alkes agar supply tidak terganggu”

Netty juga mengingatkan tanggungjawab pemerintah akan hal mendasar dalam kesehatan yaitu, perhatian yang lebih besar pada aspek promotif preventif dengan menggalakkan program hidup sehat. “Jika rakyat terbiasa hidup sehat, maka ini akan menurunkan angka kesakitan khususnya penyakit kronis yang berbiaya tinggi (katastropis). Jadi uangnya jangan hanya dibelanjakan untuk kuratif saja”

Netty menyatakan meski ia belum puas dengan kinerja BPJS Kesehatan, namun di sisi lain, ia memahami bahwa sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS memang perlu diselamatkan.

BPJS kan badan yang filosofinya pendiriannya adalah penyelenggara jaminan kesehatan sosial masal yang harus berpihak pada rakyat, menyehatkan semua, dan menjadi cara pemerintah menunaikan kewajiban konstitusional.

“Jadi orientasinya adalah pelayanan, bukan membukukan profit. Pengelolanya juga harus memiliki mind set sebagai pelayan, bukan eksekutif perusahaan. Ini yang harus dibenahi agar tidak terjadi fraud yang selama ini ditengarai juga menjadi penyebab BPJS tidak sehat secara keuangan.”



Pemerintah harus segera menurunkan rencana menaikkan biaya BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Hal itu bakal memberatkan masyarakat di tengah perekonomian saat ini yang belum membaik. Berikut Fraksi PKS DPR RI menanggapi terkait rencana kenaikan tersebut.

Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat.

Dr. NETTY PRASETYANI

Wakil Ketua Fraksi Bidang Kesra
Anggota Komisi IX DPR RI

Masyarakat mestinya diberikan ruang yang lebih nyaman dalam berkehidup-an. Ini malah di berikan be-ban, dan semakin menjauh dari kesejahteraan

dr. ADANG SUDRAJAT

Anggota Komisi IX DPR RI

BELUM SAATNYA IURAN BPJS DINAIKKAN

Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat

Dr. JAZULI JUWAINI

Ketua Fraksi PKS DPR RI



“Kenaikan iuran BPJS menambah beban hidup keluarga ekonomi kelas bawah dan beban anggaran daerah. Apakah iuran BPJS merupakan akar masalah dari kekisruhan berkepanjangan tentang hak pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat?”



Dr. KURNIASIH MUFIDAYATI

Anggota Komisi IX DPR RI

BERITA FOTO



Habib Aboe Pimpin MKD DPR RI

Habib Aboebakar Alhabsy secara resmi mengemban tugas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, dalam acara pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Turut dilantik sebagai Wakil Ketua antara lain, Trimedya Panjaitan, Andi Rio Idris Padjalangi, Habiburokhman, Saleh Partaonan Daulay.



Foto : dor.go.id

Pentingnya Sinergi KKP dan Penyuluh, Guna Sukseskan Program Kementerian

Semoga arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan ini dapat sebesar-besarnya bersinergi dengan penyuluh perikanan sehingga mereka mampu berdaya tersebar merata di seluruh area pesisir laut yang berada dibawah naungan negara kita.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP. MM

Jakarta (26/10) – Legislator PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin, meminta rekan kerjanya yang saat ini berganti posisi menjadi Menteri Kelautan Perikanan Edhi Prabowo menggantikan Susi Pudjiastuti agar melibatkan Penyuluh Perikanan untuk menyukseskan program-program kementerian yang menyentuh rakyat.

“Saat ini, ada sekitar 2.550 sampai dengan 2.963 penyuluh perikanan yang sebelumnya sebanyak 3.148 penyuluh terseleksi akibat kompetensi dan usia lanjut. Mereka ini siap terjun ke 10.624 desa pesisir dari total 78.000 desa yang ada di

Indonesia. Dengan banyaknya SDM penyuluh perikanan ini, semoga KKP kedepan mampu lebih baik dari periode sebelumnya”, terang Akmal.

Politisi PKS ini menambahkan, bahwa banyaknya SDM perikanan, saat ini sudah mulai ada kejelasan, namun masih perlu adanya upaya perbaikan pada pengelolannya di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintahan daerah, penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan, serta peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan perikanan menjadi

tanggung jawab pemerintah pusat.

Akmal mengatakan, bahwa Ide besar Menteri KKP untuk mewujudkan Industri perikanan yang bermanfaat untuk penyerapan lapangan pekerjaan dan peningkatan nilai tambah, sudah sangat bagus dengan empat fokus yang jadi pegangan. Namun, Kita perlu mengingat, tambahannya, bahwa SDM perikanan yang selama ini menjadi penyuluh masih banyak yang tidak jelas statusnya sehingga mereka banyak yang tidak diperhatikan.

Empat fokus yang dimaksud adalah bawah KKP akan membuat strategi utama

yaitu fokus pertama membangkitkan industri perikanan; kedua Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan peningkatan protein serta nilai tambah; fokus ketiga perikanan tangkap didorong untuk menangkap ikan hingga ZEE dan keempat fokus penguatan direktora jenderal pengawasan sumber daya kelautan perikanan melalui kewenangan dan koordinasi yang lebih besar.

“Semoga arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan ini dapat sebesar-besarnya bersinergi dengan penyuluh perikanan sehingga mereka mampu berdaya tersebar

merata di seluruh area pesisir laut yang berada dibawah naungan negara kita. Sebelum mengambil Sumberdaya lain diluar wilayah kerja KKP, sebaiknya optimalkan dulu dengan maksimal potensi-potensi terpendam para penyuluh dalam upaya membangkitkan keterampilan mereka, untuk memberikan pengabdianya pada negara”, tutup Andi Akmal Pasluddin.



Foto Gilang

Masalah Pertanian Perlu Diselesaikan dari Hulu Hingga Hilir

ditempatkan Fraksi PKS sebagai anggota komisi IV bidang Pertanian, Kelautan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah semua sektor pertanian masih bermasalah dimulai dari persoalan hulu yakni masalah alih fungsi lahan pertanian sehingga komponen dasar produksi pertanian semakin sulit.

Hasil riset PBS

menunjukkan analisisnya bahwa Alih fungsi lahan sawah capai 200.000 ha per tahun. Temuan ini didapat pada tahun 2018. Catatan pada tahun tersebut, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare. Pemerintah perlu memastikan, bahwa masalah alih fungsi lahan ini teratasi dengan payung hukum undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Payung hukumnya sudah jelas, tinggal kemampuan pemerintah saat ini mampu menjalankannya dengan melengkapi peraturan pemerintah dan atau peraturan

Menteri." Ucap Hamid

Persoalan kedua, lanjut hamid, yang sangat banyak membayangi sektor pertanian adalah masalah permodalan. Permodalan ini yang menyangkut persoalan yang dihadapi oleh pelaku SDM pertanian yaitu petani. Petani berperan pada proses persiapan budidaya, pelaksana produksi hingga memasarkan hasil pertanian. Petani sebagai penggerak usahatani, mulai dari pengolahan lahan, budidaya tanaman sampai dengan memanen hasil, akan dihadapkan pada pilihan antara digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipasarkan bila ada kelebihan.

"Petani harus menjadi unsur yang paling diperhatikan dalam pembangunan pertanian. Program – program bantuan sosial yang selama ini ada sejak 15 tahun terakhir, baik itu bantuan permodalan berupa PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) maupun bantuan-bantuan infrastruktur berupa irigasi tersier hingga bantuan alat mesin pertanian seperti Traktor, mesin giling



Drs. HAMID NOOR YASIN, MM
Anggota Fraksi PKS DPR RI

pati, pemotong rumput, namun semua itu belum dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Indonesia pada bidang pertanian." Tutur Hamid.

Hamid mengatakan, bahwa persoalan pertanian ini akan mampu lebih cepat diselesaikan manakala pemerintah lebih serius lagi pada penggunaan teknologi Modern. Ini sangat penting karena kecepatan pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia, meningkat pesat tanpa penyeimbangan luasan lahan produksi pertanian. Solusi yang paling masuk akal adalah penguatan teknologi pertanian di babregi dengan implementasi diversifikasi pangan.

"Contoh kota Depok dulu pernah mengkampanyekan One

Day no Rice sangat bagus. Tapi pada kenyataannya akan sulit untuk diterapkan kepada masyarakat tanpa sosialisasi intensif." Teranginya.

Maslah terakhir pada sektor pertanian menurut Hamid adalah pemasaran hasil pertanian atau pada sektor hilir yang biasa dikenal pasca panen. Olahan makanan, teknologi pangan dan gizi, higienisasi, pengemasan, hingga persoalan tata niaga, sampai saat ini belum selesai. Banyak sekali perlu perhatian serius, tidak perlu semua berbarengan, yang penting fokus pada penyelesaian masalah meskipun hanya satu per satu. Persoalan ini sudah sangat akut menyangkut hulu hingga hilir, sdm pelaku, sampai ada nya moral hazard para pelaku mafia pertanian. Impor salah satu persoalan penting yang perlu dikendalikan.

"Semoga pemerintah mampu lima tahun kedepan, Bersama dengan DPR RI Komisi IV akan bekerjasama membangun Sektor Pertanian sehingga dapat menyelesaikan semua persoalan dari hulu sampai hilir. Semua upaya ini, ujungnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang memerlukan perbaikan ekonomi terutama daya beli yang satu tahun terakhir sangat berpengaruh pada masyarakat perdesaan", tutup Hamid Noor Yasin.

Persoalan pertanian ini akan mampu lebih cepat diselesaikan manakala pemerintah lebih serius lagi pada penggunaan teknologi Modern. Ini sangat penting karena kecepatan pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia, meningkat pesat tanpa penyeimbangan luasan lahan produksi pertanian.

Drs. HAMID NOOR YASIN, MM

Jakarta (29/10) — Anggota DPR RI Asal Jawa Tengah IV, Hamid Noor Yasin menyoroti masalah pertanian yang dari tahun-ke tahun menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk diselesaikan.

"Silih Berganti Presiden, berganti Menteri, setiap tahun belum ada penyelesaian menyeluruh pada persoalan mendasar pertanian. Masalah pertanian ini ada pada setiap sektor dari hulu hingga hilir. Semua menjadi rantai sistem yang saling berkaitan menjadi kumulatif persoalan yang perlu diurai satu persatu sampai semua persoalan pertanian ini beres", ujar Legislator PKS ini.

Yang dimaksud pria yang



Data Kementerian Pertanian Perlu Dikaji Ulang

terutama swasembada murni tidak impor beras non premium. Hal inilah yang membuat negara kita belum terbebas dari keterpurukan masalah pangan dan kemiskinan”, ujar Akmal.

Legislator dari Sulawesi Selatan ini menunjukkan seperti yang diungkap mitra kerjanya selama lima tahun terakhir, tingkat kesalahan data hingga 92% yang dilakukan BPS, BIG (Badan Informasi Geospasial) dan Badan Pertanahan Nasional pada pengambilan sampel, sangat menjelaskan, terjadinya perseteruan antar lembaga kementerian yang berujung pada kebijakan Impor pangan terutama beras.

Akmal menambahkan, bahwa hampir 10 tahun terakhir, setiap tahunnya negara kita impor beras dari Thailand. Januari-Oktober 2018 mencapai 780 ribu ton dengan nilai US\$ 377,75 juta. Impor beras tersebut setara dengan 36,45% dari total impor beras yang mencapai 2,14 juta ton dengan nilai US\$ 933 juta.

Volume impor dari Thailand tersebut merupakan yang terbesar ketiga sejak 1999.

Pada tahun 2019, masih ada juga impor beras. Padahal ada 2,3 juta ton stok beras terancam membusuk dalam gudang bulog akibat serapan di masyarakat lambat. Ini menunjukkan ada permainan yang tidak bertanggung jawab hingga 92% yang dilakukan pemain beras nasional yang mengakibatkan daya tampung gudang bulog hanya tersisa 300ribu ton dari total maksimal gudang sebesar 2,6 juta ton.

“Permainan data yang mengganggu data resmi pemerintah bukan saja memanipulasi di hilir pada posisi tata niaga. Data ini dirusak sudah sejak hulu sebelum masa produksi dengan permainan pengubahan data lahan. Ujungnya adalah kebijakan impor pangan yang hanya mengejar rente. Ini yang perlu diselesaikan pemerintah bukan saja menteri pertanian saja, tapi langsung Presiden karena melibatkan banyak institusi negara” urai Politisi PKS ini.

Data ini persoalan yang sangat Vital. Ia ibarat Peta. Salah petunjuk arah kita, salah pula jalan kita. Swasembada pangan yang selalu digemborkan pemerintah hingga saat ini belum terwujud, terutama swasembada murni tidak impor beras non premium

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP. MM

Jakarta (27/10) — Pernyataan mantan menteri pertanian periode 2014-2019 Andi Amran sangat mengejutkan banyak kalangan termasuk anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

Pernyataan itu menyebut bahwa terkait tuduhan ada data mafia yang menginsersi data resmi. Hal yang membuat kaget anggota DPR dari PKS ini sehingga merujuk kembali selama lima tahun terakhir begitu banyak persoalan pada kebijakan pemerintah yang salah arah akibat salah peta.

“Data ini persoalan yang sangat Vital. Ia ibarat Peta. Salah petunjuk arah kita, salah pula jalan kita. Swasembada pangan yang selalu digemborkan pemerintah hingga saat ini belum terwujud,



Anggota Komisi IV DPR RI Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP. MM. (Foto : dpr.go.id)



Kita ingin agar para penyuluh kita diperhatikan. Baik soal fasilitas kerjanya. Dengan begitu, mereka akan bekerja lebih profesional dalam hal mendukung pembangunan sektor-sektor strategis seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga sektor kehutanan

H. JOHAN ROSIHAN, ST

Jakarta (1/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan, menyoroti pentingnya peran Pemerintah untuk Merevitalisasi Peranan dan Kedudukan Penyuluh dalam Pembangunan.

Hal ini Menurut Johan, begitu pentingnya peran penyuluh sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, entitas dan jejaring menuju Kesejahteraan masyarakat secara umum.

"Sejak berlakunya otonomi daerah dengan wewenang penuh pada pemerintah kabupaten/kota melakukan banyak perubahan kelembagaan penyuluhan, yang

Maksimalkan Peran Penyuluh sebagai Ujung Tombak Kesejahteraan Masyarakat

disatukan dengan Dinas Pertanian mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengalami stagnasi. Sementara penyuluh Bidang Kehutanan dan Perikanan yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, terkadang program penyuluhan tidak terkoordinasi, tidak memiliki hubungan sinkronisasi dan integrasi program" ungkap Johan.

Johan menambahkan beberapa metode dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota belum berjalan dengan baik dan belum memperlihatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta instansi terkait lainnya seperti institusi penelitian yang merupakan sumber teknologi (litbang pertanian, perguruan tinggi, LSM dan swasta). Sementara perkembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan petani semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.

"Kegiatan penyuluhan

pertanian masih berdiri sendiri, belum diperlakukan sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan, hal ini menyebabkan terputusnya jaringan kerjasama antara penyuluh dengan kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan lainnya. Berdasarkan perkembangan kondisi penyelenggaraan penyuluhan saat ini dan sesuai kebijaksanaan pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan; menghendaki perlunya perubahan pendekatan atau sistem penyuluhan pertanian di Indonesia dari pendekatan usahatani ke pendekatan sistem dan usaha agribisnis" tuturnya.

Untuk mencapai hal tersebut, kata Johan dalam kerangka otonomi daerah maka diperlukan kebijaksanaan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk segera melakukan rekonstruksi dan revitalisasi penyelenggaraan



H. JOHAN ROSIHAN, ST
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS

penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan bidang lainnya yang spesifik berdasarkan potensi dan keunggulan kompetitif local.

Ke depan, Johan Rosihan selaku Anggota Komisi IV DPR RI berharap adanya penghargaan yang lebih terhadap profesi penyuluh, seperti dalam hal insentif dan lain-lain. Pasalnya, pekerja sebagai penyuluh tidak mengenal waktu. Mereka bekerja kapan saja tergantung sasaran. Waktunya tidak hanya

pagi, siang dan sore, tetapi juga malam hari.

"Kita ingin agar para penyuluh kita diperhatikan. Baik soal fasilitas kerjanya hingga kesejahteraan nya. Dengan begitu, mereka akan bekerja lebih profesional dalam hal mendukung pembangunan sektor-sektor strategis seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga sektor kehutanan" Terang Politisi asal Sumbawa ini.

Seperti diketahui bahwa Penyuluhan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama (petani dan nelayan), pelaku usaha dan masyarakat, sehingga meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, baik teknis maupun non teknis untuk pengembangan usaha di bidang tersebut dan kegiatan ini merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat.

“Isu Lingkungan dan Kehutanan ini sangat sensitif di dunia internasional. Saya berharap, pemerin-tah memberikan porsi yang lebih terkait masalah lingkungan dan kehutanan ini.

drh. SLAMET

Jakarta (30/10) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, mengamati semua Menteri mitra Komisi IV DPR RI periode 2014 – 2019 telah diganti oleh presiden Jokowi pada kepemimpinannya yang kedua, kecuali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Slamet yang juga ketua kelompok Komisi IV FPKS DPR ini akan bermitra dengan tiga kementerian dan 2 badan, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Urusan Logistik dan Badan Restorasi Gambut.

Legislator Kota dan Kabupaten Sukabumi ini berharap, bahwa bertahannya

Tak Ada Perubahan Menteri, KLHK Harus Kerja Lebih Cepat

Menteri kehutanan menjabat hingga dua periode perlu trobosan yang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan kehutanan. Digabungnya dua kementerian menjadi satu sejak kepemimpinan Jokowi tahun 2014, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata tidak memberikan kepuasan semua pihak.

Ketidakpuasan digabungnya dua kementerian ini yang paling keras dari mayoritas anggota DPR RI komisi VII yang bermitra dengan Kementerian ESDM dimana banyak mitra Kementerian ESDM berpotensi merusak lingkungan pada aktivitas penambangan.

“Isu Lingkungan dan Kehutanan ini sangat sensitif di dunia internasional. Saya berharap, pemerintah memberikan porsi yang lebih terkait masalah lingkungan dan kehutanan ini. Kebakaran Hutan dan lahan, anomali iklim, emisi karbon, perburuan satwa liar, dan masalah perhutanan

sosial”, kata Slamet.

Legislator PKS ini mengingatkan bahwa kebakaran hutan menjadi catatan buruk pemerintahan Indonesia di mata Internasional. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution dan menyepakati ASEAN akan bebas kabut asap pada tahun 2020.

“Selama rentang kepemimpinan 2014-2019 Presiden Joko Widodo, terjadi 2 kali kebakaran besar yang mengakibatkan kerugian besar secara ekonomi sosial dan lingkungan, yaitu pada tahun 2015-2019.” Ucap Slamet.

Keduanya Lanjut Slamet merupakan tahun terjadinya El Nino, dimana terjadi arus panas yang ekstrem. Keberadaan El Nino ini telah dapat terprediksi, harusnya pemerintah lebih dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah kebakaran hutan.

Terlebih telah diketahui, bahwa kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu perlu ada tindakan



Anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet (Foto : Ardian / Humas FPKS)

tegas terhadap pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Semoga dengan berlanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini di periode ke dua kepemimpinan Jokowi, mampu membawa nama baik bangsa dengan tidak ada lagi perusakan lingkungan dengan

kejadian kebakaran hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan telah mengakibatkan protes beberapa negara tetangga yang kemudian diekspose pada media internasional. Selamat Bekerja Menteri KLHK ibu Siti Nurbaya Bakar”, tutup Slamet.

BERITA FOTO



PKS Orientasi Staf Pendukung Parlemen

Jakarta (1/11) - Fraksi PKS Parlemen melakukan orientasi kepada tenaga ahli, staf administrasi, dan staf ahli DPR RI dan MPR RI di Aula RJA DPR Kalibata pada Jum'at (1/11). Acara dihadiri dan diisi arahan oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Pimpinan Fraksi PKS DPR dan MPR RI.

Photo : Ero

Fraksi PKS butuh dukungan SDM yang handal dengan pikiran dan gagasan besar karena target dan tanggung jawab PKS besar untuk memperjuangkan rakyat, umat, dan pengokohan nasionalisme Indonesia

**Dr. H. JAZULI
JUWAINI, MA**

Jakarta (1/11) - Fraksi PKS Parlemen melakukan orientasi kepada tenaga ahli, staf administrasi, dan staf ahli DPR RI dan MPR RI di Aula RJA DPR Kalibata pada Jum'at (1/11). Acara dihadiri dan diarahkan oleh Presiden PKS Sohibus Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Pimpinan Fraksi PKS DPR dan MPR RI.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam sambutannya, melalui orientasi ini diharapkan staf pendukung Fraksi PKS dapat bekerja dengan baik, cepat, cerdas, terarah, dan solid dalam

Ingin Terdepan di Parlemen, PKS Orientasi Staf Pendukung

mendukung Fraksi PKS menjadi yang terdepan di Parlemen dalam membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan umat.

"Visi PKS Parlemen menjadi yang terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang berkarakter, maju, adil dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu tenaga ahli dan staf harus bekerja cepat, cerdas, terarah dan solid," tegasnya.

PKS lanjut Jazuli belum menjadi partai besar di parlemen tapi PKS punya posisi strategis sebagai partai yang sejak awal memilih di luar pemerintahan sehingga bisa lebih objektif dalam menilai kebijakan eksekutif secara kritis dan konstruktif. Karena belum besar maka gaya PKS harus kreatif, inovatif, dan atraktif yang substantif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

"Sebagai partai politik dan wakil rakyat kita perlu kerja-kerja yang kreatif dan inovatif guna menarik partisipasi rakyat secara luas dengan muatan substansi yang kuat, rasional, dan objektif sehingga bisa diterima dan menjadi solusi bagi rakyat bangsa dan negara," katanya.

Untuk mewujudkan hal itu Fraksi PKS butuh dukungan SDM yang handal dengan pikiran dan gagasan besar karena target dan tanggung jawab PKS besar untuk memperjuangkan rakyat, umat, dan pengokohan nasionalisme Indonesia. Tidak hanya berhenti pada gagasan besar, tapi gagasan itu harus dapat disajikan secara cepat, cerdas, dan terarah agar anggota dewan PKS selalu terdepan.

"Terdepan itu artinya orang baru berpikir kita sudah melakukan, giliran orang melakukan kita sudah berpindah melakukan hal lain yang lebih inovatif. Itulah ciri khas Fraksi PKS Parlemen," pungkas Jazuli.





ORIENTASI

TAA, TAF dan SAA
DPR RI dan
MPR RI

JAKARTA 01 11 2019

Orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi, Staf Ahli DPR RI dan MPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Mencapai Keberhasilan Kerja & Kinerja dalam Berkhidmat untuk Rakyat
Aula K... .. Jakarta Selatan, Jum'at, 01 November 2019/04 Rabiul Awal 1441



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

KETUA FRAKSI PKS DPR RI

Sebagai partai politik dan wakil rakyat kita perlu kerja-kerja yang kreatif dan inovatif guna menarik partisipasi rakyat secara luas dengan muatan substansi yang kuat, rasional, dan objektif sehingga bisa diterima dan menjadi solusi bagi rakyat bangsa dan negara



Urgensi Persatuan dalam Sumpah Pemuda, Demi Keutuhan NKRI

Jakarta (28/10) — Hari Sumpah Pemuda menjadi perhatian khusus bagi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini. Momentum Sumpah Pemuda menjadi sarana dalam menyatukan seluruh pemuda Nusantara, untuk bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bangsa Indonesia hari ini memperingati hari yang bersejarah bagi kebangkitan dan pergerakan seluruh pemuda di Nusantara yakni Hari Sumpah Pemuda. Hari yang menjadi tonggak bagi pemuda Indonesia, untuk bisa kembali melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dan mengisi kemerdekaan di dalamnya dengan mengambil peran sesuai keahlian masing-masing" disampaikan Jazuli Juwaini dalam keterangan pers pada hari Senin (28/10) di Jakarta

Jazuli menambahkan, penting sekali bagi seluruh Pemuda Nusantara, untuk bersama-sama dalam satu barisan, satu langkah dalam menjaga bangsa yang kita cintai

ini, dari siapa pun yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.

Sebagai bentuk komitmen PKS dalam menghadirkan kepemimpinan di kalangan Pemuda, terbukti tujuh persen dari total seluruh Anggota Parlemen PKS berusia dibawah 30 Tahun.

"Keberadaan mereka bukan sebagai pelengkap, namun satu bagian yang tidak terpisahkan dalam ikhtiar perjuangan Parlemen Fraksi PKS. Mereka hadir bukan karena sebatas keturunan siapa dan darimana asalnya, namun berdasarkan kompetensi dan kapabilitas dalam merit system yang teruji" tegasnya.

Menurut Jazuli bersatunya pemuda Nusantara dalam menjaga NKRI, dari berbabagi pihak yang berniat mengusik bangsa Indonesia dengan sendirinya tak akan pernah berani karena kekuatan dan kekompakan kita di dalamnya.

"Jika kita bersatu saya yakin bahwa peristiwa di Papua tidak akan pernah terjadi, karena semua kompak dalam

menjaga persatuan, serta tidak mudah dipecah belah apalagi dihasut yang nantinya akan merugikan bangsa kita" pungkang Anggota Dewan asal Banten ini.

Lebih lanjut Jazuli menambahkan, disamping modal persatuan dan kesatuan, hal lain yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan satu persatu persoalan yang mendera bangsa dan kita carikan solusinya agar keluar dari persoalan yang menerpa.

"Kita sadar bahwa bangsa ini banyak persoalan yang satu persatu harus dicarikan solusinya secepat mungkin. Oleh karena itu, jika persatuan ini bisa kita jaga dan tingkatkan bukan mustahil sebanyak apapun masalah bisa kita selesaikan secara bersama-sama". Tutup Jazuli.

Hari Sumpah Pemuda
Hari yang menjadi
tonggak bagi pemuda Indonesia,
untuk bisa kembali melanjutkan
cita-cita para pendiri bangsa dan
mengisi kemerdekaan di
dalamnya dengan mengambil
peran sesuai keahlian
masing-masing



Foto : Gilang Ramadhan

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

HADAPI PERSAINGAN DAN TANTANGAN ZAMAN

Generasi Muda Harus Berani!

Hadirnya berbagai tantangan tersebut, para pemuda harus ingat dan berpegang teguh pada falsafah kita yaitu Pancasila. Utamanya sila pertama, tentang Ketuhanan Yang Maha Esa

Habib ABOEBAKAR ALHABSY

Jakarta (28/10) — Selamat Hari Sumpah Pemuda ke 91, momentum Sumpah Pemuda adalah peringatan yang merefleksikan kesadaran kaum muda Indonesia akan nilai persatuan dan kebangsaan. Nilai-nilai dalam sumpah pemuda harus terus dipegang teguh oleh para generasi muda, karena dengan bersatu kita akan bisa maju.

Anggota DPR RI Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi berharap dalam momentum Sumpah Pemuda, para generasi muda bisa menjawab tantangan sesuai dengan perkembangan zaman, karena tantangan pemuda Indonesia menghadapi era revolusi industri 4.0 tidaklah mudah.

“Hal ini harus benar-benar dipersiapkan sejak dini, sehingga para pemuda kita akan mampu bertahan di persaingan global.” Tutur pria yang akrab disapa Habib Aboe.

Aboe Bakar menambahkan dalam bersaing di pentas global, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pertama, para pemuda harus siap dengan era disrupsi, dimana segala sesuatu sudah diatur dengan bantuan sistem otomatis, kecerdasan buatan, maupun konsep internet of things.

“Diperkirakan akan ada lima juta pekerjaan yang hilang akibat munculnya inovasi di bidang teknologi. Oleh karena itu, jangan heran jika dalam waktu dekat, saingan terdekat dari para pemuda itu bukan lagi tenaga kerja lulusan universitas ternama, melainkan keberadaan teknologi terapan

termutakhir.” Lanjut Aboe Bakar.

Tantangan kedua kata Aboe Bakar adalah bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia mulai tahun 2020. Dimana ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif di rentang 15-64 tahun yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif.

“Artinya, para pemuda ini akan mengalami persaingan yang cukup ketat di dalam negeri. Karena banyak usia produktif yang akan menjadi pesaing mereka sejak tahun depan.” Tegas Habib Aboe

Habib Aboe menambahkan tantangan keempat, banyaknya generasi muda yang senantiasa penuh dengan ide-ide segar. Ini artinya, sesama para pemuda akan ada gagasan dalam pengembangan bisnis. Oleh karenanya, kita harus selalu mendorong munculnya berbagai ide kreatif dan berinovasi, agar gagasan segar dapat senantiasa lahir dan bertumbuh.

“Hadirnya berbagai tantangan tersebut, para pemuda harus ingat dan berpegang teguh pada falsafah kita yaitu Pancasila. Utamanya



HABIB ABOEBAKAR ALHABSY, Pimpinan Fraksi PKS DPR RI (Foto : dpr.go.id)

sila pertama, tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ucap Aboe Bakar.

Menurut Aboe Bakar, Apapun yang terjadi, seberat apapun tantangan yang ada, kita harus menyandarkan seluruh usaha yang dilakukan dalam kerangka keimanan.

“Hal ini diperlukan untuk mereduksi tingkat stress ataupun munculnya sikap prustasi.

Sehingga daya tahan mereka akan tetap baik meskipun dalam persaingan yang sangat keras.” Tutup Habib Aboe.

HILANGKAN BAYANG-BAYANG KESUKSESAN ORANG TUA

Saatnya Parlemen Muda Berkarya

Setiap kali sebuah negara mengalami gejala perjuangan, ada peran-peran pemuda di dalamnya.

Karena sebuah kebangkitan suatu bangsa, maka pemuda adalah rahasia kekuatannya.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Jakarta (28/10) -- Banyaknya anak-anak muda terpilih menjadi anggota parlemen di usia yang sangat belia membuat anggota DPR RI dari Sumatera Barat II merasa kagum, bangga dan menyisakan beberapa keheranan. Dari sekian banyak parlemen muda yang duduk di DPR RI, DPRD Propinsi, dan DPRD tingkat II Kabupaten Kota, rata-rata telah memiliki dua modal besar berupa modal jaring dan dana.

"Pada kesempatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019 ini, saatnya para parlemen muda, agar lebih dalam memaknai perjuangan para pahlawan bangsa,

sehingga karyanya adalah murni karya diri sendiri tanpa bayang-bayang orang tua", ujar Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, sejak dahulu hingga kini, para pemuda adalah pilar kebangkitan bangsa. Setiap kali sebuah negara mengalami gejala perjuangan, ada peran-peran pemuda di dalamnya. Karena sebuah kebangkitan suatu bangsa, maka pemuda adalah rahasia kekuatannya. Betapa hebatnya peran serta anak muda membangun negeri dan bangsa, karena pemuda adalah tonggak dari berdirinya suatu negara.

"Banyak cara anak muda memaknai "Hari Sumpah Pemuda", diantaranya dengan cara berprestasi, bergotong-royong, saling menghargai, dan saling menghormati. Dengan ragamnya bangsa kita akan suku, budaya, dan agama, mestinya membuat kita terbuka untuk bersama-sama membangun negeri ini dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika", ucap legislator PKS itu.

Bung Karno, Presiden Pertama kita, tambah Nevi, jauh sebelum kita lahir telah mengatakan "Beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia". Kini parlemen muda lebih dari 10 orang. Saat ini pula, pada moment hari Sumpah Pemuda, perlu menjadi ajang pembuktian kebenaran kata-kata bersejarah pendiri bangsa oleh para parlemen muda.

"Semoga para Parlemen muda mampu membuat inspirasi lanjutan dalam kerja-kerja nyata sebagai anggota parlemen di Senayan. Bukan sekedar terpilih, namun memberi sumbangsih nyata untuk kemajuan bangsa dan negara bukan sekedar wacana dan kata-kata. Kita semua, dari berbagai generasi yang hidup di bumi pertiwi, perlu bekerja sama, saling bahu-membahu, demi Indonesia, negerinya tercinta", tutup Nevi Zuirina.

Sumber Foto:
dpr.go.id



Gebrakan Sakinah Al-Jufri di Momen Sumpah Pemuda

Mengajar sudah merupakan jati diri para Abnaul khairaat, dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja yg butuh sudah merupakan kewajiban untuk memberikan pengajaran Islam

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Jakarta (28/10) --- Belum genap satu bulan Sakinah Al-Jufri dilantik menjadi anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, namun gebrakan programnya sudah dapat dirasa masyarakat. Sakinah sudah mendirikan taman Al-Qur'an yang didedikasikan untuk masyarakat Sulawesi Tengah dan sekitarnya.

"Agar ummat muslim yang buta baca tulis Al-Qur'an dapat lebih memahami isi Al-Qur'an" Ujar nya saat diwawancarai Senin (28/10/2019).

Sakinah juga beranggapan

dengan dibentuknya taman Al-Qur'an yang berlokasi di seputaran pasar tradisional merupakan tempat strategis dan memadai karena para orang tua di pasar lebih sibuk berjualan sehingga anak-anak kurang mendapatkan pembelajaran agama ditambah lagi banyak yang membuka taman belajar Al-Qur'an dengan bayaran, sedangkan anak-anak pasar mereka tidak tersentuh dengan pendidikan agama yang memadai, maka Sakinah membukanya secara gratis.

Mantan guru yang sering disapa Umi Sakinah itu seolah tak ada hentinya untuk terus menyuarakan peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan khusus pendidikan agama.

Sakinah memang baru saja dilantik namun gerola wakil rakyat di badannya, seolah sangat kental untuk menyuarakan hak-hak rakyat di Sulawesi Tengah, seolah mengingatkan kita pada Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 yang dipimpin pemuda Soegondo Djopoespito dari PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia).

"semangat yang luar biasa



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

dilakukan para pemuda saat itu, yang terus melakukan peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan sehingga memperkuat kesadaran kemerdekaan, kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia" tuturnya.

Di momen sumpah pemuda ini, Sakinah berharap taman Al-Qur'an yang dibentuknya itu bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar khususnya di bidang keilmuan agama.

"mengajar sudah

merupakan jati diri para Abnaul khairaat, dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja yg butuh sudah merupakan kewajiban untuk memberikan pengajaran Islam". Tutup Sakinah

Peran Pemuda Berintegritas, Sebagai Penggerak Fungsi Legislatif



BERITA FRAKSI PKS

Fraksi.pks.id | Senin 28 Oktober 2019



Karena perannya yang konsisten dari masa ke masa, maka pemuda memiliki eksistensi dan legitimasi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag. M.Si

f Fraksi PKS DPR RI @fraksipksdprri @fpxksdprri fraksi.pks.id

Jakarta (28/10) — Peringatan hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober merupakan momentum untuk memberikan perhatian dan mendorong para pemuda untuk melakukan aktivitas positif dan produktif sebagai kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran dan catatan gemilang dalam perjalanan sejarah Indonesia.

"Sejak zaman pra kemerdekaan, pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan. Pemuda menjadi pelaku sejarah dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami bangsa ini. Dalam setiap pergantian masa dan perubahan zaman, pemuda menjadi sosok yang mampu menginspirasi dan mengiringi proses transisi yang terjadi. Perjalanan panjang bangsa ini terbentuk melalui semangat dan pengorbanan para pemuda pejuang bangsa," tutur Anis.

Anis menjelaskan bahwa sejak tahun 1908 para pemuda telah berperan menjadi penggagas dan perintis kemerdekaan dengan mendirikan organisasi Budi Utomo yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Berlanjut pada tahun 1928 dengan digelarnya kongres pemuda kedua dan diakhiri oleh ikrar sumpah pemuda. Ikrar sumpah pemuda itu di rumuskan oleh Muhammad Yamin yang saat itu berusia 25 tahun. Dan puncaknya pada tahun 1945 disaat para pemuda menekan Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

"Karena perannya yang konsisten dari masa ke masa, maka pemuda memiliki eksistensi dan legitimasi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat," pungkasnya.

Anis menjabarkan potensi yang dimiliki para pemuda hari

ini diantaranya 24,27% penduduk Indonesia atau sejumlah 63,36 juta jiwa adalah pemuda (data BPS tahun 2017), jumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) terus meningkat yaitu sebanyak 276.787 dari tingkat nasional sampai kelurahan/desa, peran pemuda dapat diandalkan sebagai agen perubahan, kontrol sosial dan kekuatan moral, kapasitas dan kualitas pemuda dapat dikembangkan sebagai penentu masa depan bangsa, pemuda pengembangan misi dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

"Masalah yang dihadapi para pemuda saat ini diantaranya rendahnya tingkat partisipasi sekolah dan pendidikan, tingginya tingkat pengangguran pemuda, terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran pembangunan kepemudaan, rendahnya tingkat daya saing kepemudaan, aktivitas pemuda

lebih banyak di kota dari pada di desa, program kepemudaan yang tidak terintegrasi, serta beban pemuda yang seringkali berperan ganda termasuk sebagai tulang punggung keluarga," ucapnya.

Anis berharap para pemuda mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, berusaha menjaga nama baik bangsa dan negara, mampu memupuk keunggulan, peduli terhadap lingkungan, menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing, peduli terhadap problematika bangsa dan negara serta membantu mencari solusi-solusinya.

"Pemuda harus tetap berperan sebagai agen perubahan. Menjadi pionir dalam setiap proses perjuangan," tegas Anis

Anis menambahkan berbagai masalah yang dihadapi pemuda saat ini seyogyanya menjadikan pemuda lebih bersemangat,

untuk lebih produktif terutama dalam ikut serta memajukan bangsa.

"Dengan karakternya yang khas yaitu enerjik, dinamis, kreatif, inovatif dan berani, pemuda harus terus melakukan kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, kebijakan pemerintah, problematika dan masa depan bangsa. Kontrol sosial yang dilakukan pemuda sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara kita," ucap Anis.

Pemuda kata Anis, perlu menyadari bahwa mereka menjadi tumpuan harapan masyarakat di masa depan. Spirit sumpah pemuda yang digagas para pemuda 91 tahun yang lalu harus terus hidup di dalam ruh dan di tengah jiwa para pemuda.

"Karena para pemuda hari ini adalah para pemimpin masa depan," tutup Anis Byarwati.

BERITA FOTO



Silaturahmi DPP Nasdem ke DPP PKS

Ketua Fraksi PKS DPR Dr. H. Jazuli Juwaini, MA dan Sekretaris Fraksi PKS Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T turut hadir dalam acara silaturahmi DPP Nasdem yang dipimpin Surya Paloh ke DPP PKS pada Rabu 30 Oktober 2019. Turut hadir dalam acara ini Ketua Majelis Syuro PKS, Presiden PKS beserta jajaran pimpinan DPP lainnya.

Menteri Perdagangan Harus Serius Tekan Impor

Persoalan besar dalam kebijakan impor adalah karena tidak adanya tata niaga di beberapa komoditas strategis, akibatnya pemerintah sering sekali mengalami defisit neraca perdagangan.

Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt.

Jakarta (30/10) --- Di awal masa pemerintahan yang kedua, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menekan Impor dan meningkatkan ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan. Kebijakan tersebut mendapat tanggapan oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari Fraksi PKS Chairul Anwar, "Menteri perdagangan harus serius untuk menekan impor, sesuai amanah dari Presiden Jokowi", ungkap Chairul di tengah rapat perdana Komisi 6 di Gedung DPR RI senayan, (Rabu,30/10/2019).

Chairul menilai persoalan impor ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah tidak adanya peta jalan (road map) di beberapa komoditas strategis.

"Persoalan besar dalam kebijakan impor adalah karena tidak adanya tata niaga di beberapa komoditas strategis, akibatnya pemerintah sering sekali mengalami defisit neraca perdagangan. Pemerintah hingga kini belum memiliki peta jalan di beberapa komoditas strategis, sehingga tidak adanya perencanaan yang jelas untuk mengembangkan industri

komoditas strategis", jelas anggota DPR RI dapil Riau 1 ini.

Pemasalahan Impor yang lain juga adalah tidak adanya data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan impor. Perbedaan data antar kementerian dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) sering terjadi, sehingga pemerintah sering sekali mengambil kebijakan yang berbeda antar kementerian.

Oleh karena itu Chairul meminta pemerintah untuk membenahi data yang dimiliki dan melakukan audit secara

independen terhadap kuota kebutuhan impor di beberapa komoditas strategis.

"Penetapan kuota kebutuhan impor harus dilakukan dengan menghitungkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga tidak terjadi over kuota yang dapat menyebabkan harga di tingkat produsen dalam negeri menjadi anjlok", kata Politisi PKS asal Riau ini.

Sebagai penutup anggota Fraksi PKS ini mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan impor.

"Selama ini pemerintah

mengeluarkan kebijakan impor atas dasar kuota, sehingga menyebabkan adanya perbedaan harga yang teralalu besar dari produsen importir sehingga merugikan produsen lokal. Kami mengusulkan impor dilakukan atas dasar tarif, sehingga harga yang diberikan oleh produsen importir dapat semakin kompetitif", ungkap Chairul.

Sumber Foto : Hilal
Background : Istimewa

Jakarta (1/11) --- Defisitnya Neraca Dagang per September 2019 sekitar US\$ 160 Juta menjadi perhatian anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina.

Menurut Nevi ada persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang, yakni pengendalian impor yang dilakukan secara sistemik, sehingga semua kebijakan yang keluar akan berpihak pada masyarakat.

"Reformasi sistem Impor menjadi sangat penting dilakukan untuk membangun sebuah regulasi, guna menciptakan iklim usaha yang sehat sampai pada tingkat paling kecil, yakni usaha mikro yang skala usahanya beraset dibawah 50 juta rupiah dengan omset dibawah 300 juta rupiah per tahun". ucap Nevi.

Persoalan Impor hingga saat ini, lanjut politisi PKS ini,

Reformasi sistem Impor menjadi sangat penting dilakukan untuk membangun sebuah regulasi, guna menciptakan iklim usaha yang sehat sampai pada tingkat paling kecil

Hj. NEVI ZUAIRINA



Indonesia Perlu Reformasi Sistem Impor yang Pro Rakyat

pemerintah belum memberi solusi yang memadai sehingga menjadikan produk dalam negeri tidak berkembang, membanjir produk luar, kreativitas dan inovasi anak bangsa tidak tumbuh. Ini merupakan persoalan besar bagi negara untuk membangun ekosistem usaha yang perlu diselesaikan dengan campur tangan negara.

"Kita ini kan sudah merdeka lebih dari 74 tahun ya. Pemerintahan sudah beberapa kali ganti. Namun produk unggulan kita yang muncul dari bawah dari skala yang paling kecil, mikro, kecil atau menengah sangat minim. Padahal potensi keragaman usaha dan produk yang mampu kita hasilkan, bila digarap serius akan mampu bersaing dengan produk luar negeri dengan kualitas premium", jelas Nevi.

Legislator Sumatera Barat

ini menjelaskan, secara spesifik, terjadi perubahan ekspor pada bulan September 2019 secara tahunan dimana perubahan yang paling signifikan pada sektor Migas yang turun 37,13% menjadi US\$ 0,83 miliar. Pada sektor pertanian, terjadi kenaikan sebesar 24% menjadi US\$ 0,36 miliar. Sektor pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,44% menjadi US\$ 10,85 miliar dan pada sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 14,82% menjadi US\$ 2,06 miliar. Namun secara umum, telah terjadi Defisit sebesar US\$ 160 Juta.

Data, kata nevi, menjadi instrumen vital pada pengambilan kebijakan impor. Pemerintah perlu menetapkan, data mana yang menjadi rujukan, satu saja sehingga perseteruan antar kementerian dapat dicegah akibat klaim

kebenaran data. Perbedaan data antar kementerian dan BPS, menjadi salah satu sumber kekisruhan kebijakan.

"Saya berharap, pemerintah mampu membuat formulasi untuk mereformasi kebijakan impor. Kebijakan impor atas dasar kuota selama ini sudah terbukti gagal. Karena menyebabkan disparitas yang sangat besar antara komoditas impor dengan produsen lokal. Kami menunggu kreatifitas pemerintah untuk diusulkan kepada DPR, pada regulasi Impor yang memihak kepada rakyat yang berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan", Pungkas Nevi Zuairina.

PKS Desak Pemerintah Reformasi Regulasi Impor



Dengan sistem impor berbasis tarif, maka akan merombak skema perizinan dan aturan importasi. Ini kebijakan yang sangat revolusioner. Kebijakan impor berbasis tarif juga akan jadi instrumen melindungi petani

AMIN, AK. MM

Jakarta (31/10) — Di awal pemerintahan yang kedua, Jokowi memerintahkan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan.

Presiden Jokowi memerintahkan untuk mengurangi barang impor, dan menggantinya dengan barang yang dapat diproduksi sendiri.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VI DPR RI dari PKS Amin Ak menyatakan, persoalan impor sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan walaupun sudah beberapa kali

ganti pemerintah.

Padahal impor yang tidak tertata dengan baik merugikan industri dalam negeri, dan juga bisa mematikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Lebih lanjut Amin Ak menyebutkan, beberapa kelemahan yang harus segera dibenahi oleh pemerintahan Jokowi periode kedua. Pertama, belum adanya peta jalan (road map) impor khususnya untuk beberapa komoditas strategis. Kedua, belum adanya data yang benar-benar dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan impor.

“Data antar kementerian dan juga Badan Pusat Statistik

(BPS) sering berbeda sehingga menimbulkan kebijakan yang berbeda antar instansi Pemerintah,” kata Pria yang lama menjadi akuntan negara ini.

Kelemahan ketiga, sistem kuota yang digunakan dalam menjalankan kebijakan impor selama ini dianggap merugikan sejumlah pihak. Terbatasnya jumlah pelaku impor dapat menimbulkan praktik kartel dan menyebabkan harga yang ditawarkan kepada konsumen tidak kompetitif. Selain itu sistem kuota berpotensi diperjualbelikan dan dimanipulasi sehingga menimbulkan rent seeker.

“Kelemahan lain sistem kuota adalah terkait waktu

pelaksanaan impor. Apabila impor besar-besaran dilakukan menjelang panen raya maka sangat merugikan petani karena harga hasil panen jatuh,” tambahnya.

Selanjutnya Amin Ak mengatakan, untuk mengontrol impor khususnya komoditas strategis, kebijakan impor berbasis tarif (bea masuk) dapat menjadi solusi. Tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan internasional seperti yang berlaku di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO). Dengan sistem impor berbasis tarif, maka akan merombak

skema perizinan dan aturan importasi.

“Ini kebijakan yang sangat revolusioner. Kebijakan impor berbasis tarif juga akan jadi instrumen melindungi petani,” tegas Amin.

Amin menegaskan saat musim panen pemerintah menaikkan tarif biaya impor dan saat terjadi kelangkaan supply pemerintah menurunkan tarif biaya impor.

“Keseimbangan antara supply dan demand dan tidak adanya praktik kartel dalam impor akan menguntungkan semua pihak.” Tutup Amin.

DPR: Berharap BUMN Lebih Baik, di Tangan Erick Tohir

Semoga bapak Erick Tohir Mampu membawa idealismenya untuk diterapkan di Institusi negara ini. Sebagai langkah awalnya adalah tidak ada titipan SDM untuk masuk di kementerian karena Menteri berasal dari profesional, bukan orang partai.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Jakarta (26/10) — Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Nevi Zuairina menyatakan, meski berada pada oposisi di pemerintahan lima tahun kedepan, Nevi memandang ada harapan besar, bagi BUMN di tangan Menteri Erick Tohir, menjadi institusi yang semakin sehat.

Namun ia akan terus memperhatikan, sejauh mana kinerja Kementerian BUMN selama 100 hari kedepan, apakah akan mampu membawa ke arah yang lebih baik, atau tidak ada perubahan yang akan signifikan.

“InsyAllah saya akan bermitra dengan Kementerian BUMN, dan pada rapat-rapat kerja antara DPR dan kementerian, akan bersinergi

antara komisi VI dengan Kementerian BUMN. Semoga bapak Erick Tohir Mampu membawa idealismenya untuk diterapkan di Institusi negara ini. Sebagai langkah awalnya adalah tidak ada titipan SDM untuk masuk di kementerian karena Menteri berasal dari profesional, bukan orang partai”, ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini meminta kepada kementerian BUMN agar kementerian BUMN terus melakukan Konsolidasi dengan strategi holdingisasi. Ini perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kapabilitas BUMN dalam kancha persaingan global. Bila tidak ada penghalang besar, ia yakin BUMN akan menuju Super Holding.

Kedepannya, lanjut Nevi, Kementerian BUMN sangat perlu membentuk Komite Talent yang terdiri dari para profesional yang independen dan kredibel. Tugas Komite ini untuk mencari, menyeleksi, mengusulkan dan memantau perilaku dan kinerja semua Direksi/calon Direksi BUMN (pejabat setingkat di bawah Direksi) sepanjang waktu. Komite inilah yg mengusulkan shortlist untuk proses fit and proper jika ada kebutuhan Direksi di suatu BUMN.

Politisi PKS ini meyakini, bila Menteri BUMN berkomitmen untuk tidak melakukan perayaan dan seremoni dalam 100 hari kedepan demi membangun budaya kinerja yang mumpuni,



Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina (Foto : Istimewa)

Kementerian yang ia pimpin akan menjadi sebuah institusi yang sangat berwibawa.

“Terakhir saya berharap kepada bapak menteri, agar menyusun guidelines yang jelas tentang porsi profit center dan agen pembangunan pada setiap BUMN. Ini penting agar budgetingnya lebih proporsional dengan fungsi - fungsi yang ada. Dengan adanya guidelines yang

jelas, akan secara bersamaan dapat menjaga ekspektasi investor yang masuk ke BUMN-BUMN yang telah menjadi perusahaan tbk. Semoga Kementerian BUMN semakin baik kedepannya membawa sumbangsih negara untuk kepentingan Rakyat Indonesia”, tutup Nevi Zuairina.

HARI ASPIRASI

Kunjungan STIU Dirasah Islamiyah Al-Hikmah

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI H. Ecky Awal Mucharam menerima kunjungan dari STIU Dirasah Islamiyah Al-Hikmah pada Selasa 29 Oktober 2019 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.



Foto: Ardiyaningrum / Humas FPKS



Tanggapi Pernyataan Menag, PKS Harap Menag Sejukan Suasana



H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA

Jakarta (1/11) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis menentang wacana Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan.

Iskan menyampaikan sebaiknya Menag harus lebih menyejukkan suasana, bukan justru membuat pernyataan kontroversi.

"Berkaitan rencana menag membuat peraturan larangan cadar, niqab dan celana cingkrang di kawasan pemerintahan, hal ini terlalu mendramatisir pengertian dari radikalisme". ucap Iskan

Iskan menambahkan Menag harus paham secara luas apa itu radikalisme. Jangan mengurus hal pribadi seseorang, harus buat kajian dulu tentang larangan itu, apakah ada hubungan antara radikalisme dengan cadar ? Sementara cadar adalah tradisi orang Arab,dan itu sah-sah saja.

"Negara itu tidak boleh terlalu mencampuri internal

agama, karena dia pasti akan jadi kacau," kata Iskan.

Iskan mengatakan Menag perlu membiarkan perbedaan mazhab dalam agama berkembang di masyarakat selama seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. "Itu orang beda pendapat boleh saja, termasuk cadar dan celana cingkrang itu hak asasi manusia," ungkapny.

Lebih lanjut Iskan mengungkapkan, cadar tidak bisa menjadi indikator radikalisme.

"Apakah orang bercadar otomatis dia radikal kan belum tentu. Tidak usah terlalu memaksakan itu. Karena nanti kalau melakukan sesuatu dengan pemaksaan maka akan ada lagi kontra yang tidak selesai-selesai," ujarnya.

Sebaiknya, Iskan menegaskan menag harus fokus kepada hal yg substansial. Misal masalah pengelolaan dana haji yg harus optimal kebermanfaatannya, masalah kerukunan umat beragama , dan lain sebagainya.

Apakah orang bercadar otomatis dia radikal kan belum tentu. Tidak usah terlalu memaksakan itu. Karena nanti kalau melakukan sesuatu dengan pemaksaan maka akan ada lagi kontra yang tidak selesai-selesai

Wacana Menag Larang Cadar ditentang Anggota DPR

Hendaknya pemerintah jangan terus menerus berbicara tentang radikalisme, mari cari narasi yang sejuk, enak didengar, dinikmati oleh semuanya, tidak ada yang merasa didiskriminasikan, kita ciptakan budaya santun dalam segala hal!"

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sulawesi Tengah

Jakarta (1/11) -- Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri menilai, pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyinggung penggunaan niqab atau cadar telah menimbulkan kegaduhan.

Menurut Sakinah penganut paham radikal tidak bisa hanya dilihat atau dinilai dari cara berpakaian saja.

"Menteri agama kali ini benar-banar masuk pada wilayah privasi dan keyakinan dalam menjalankan ajaran agamanya dan ini sangat melukai hati umat, seakan-akan cara berpakaian semacam itu identik dengan radikalisme. Ini tidak adil terhadap umat Islam. Terus terang, banyak saudara-saudara kita yang menggunakan pakaian semacam itu berbuat banyak, baik untuk mencerdaskan bangsa ini dan membangun negeri ini", ujarnya.

Dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat bagi laki-laki atau pun perempuan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat.

"Islam adalah agama yang penuh rahmat bila ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu Individu, jangan disinggung pakaiannya, cadarnya. Tentu yang mayoritas menggunakan pakaian tersebut akan terusik dan bisa termarjinalkan, hendaknya pemerintah jangan terus menerus berbicara tentang radikalisme, mari cari

narasi yang sejuk, enak didengar, dinikmati oleh semuanya, tidak ada yang merasa didiskriminasikan, kita ciptakan budaya santun dalam segala hal". Ucap Sakinah.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di al-quran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab. Namun Fachrul mewacanakan akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. Pertimbangannya adalah alasan keamanan, belajar dari insiden penusukan Menko Polhukam terdahulu, Wiranto, yang salah satu pihak penyerangnya memakai cadar.

Tragedi yang menimpa Wiranto tidak bisa serta-merta menjadi alasan untuk melarang pemakaian cadar di instansi pemerintah. Jika pun ada pemakai cadar yang melakukan tindak terorisme, itu merupakan oknum. Yang perlu ditindak adalah oknumnya, bukan pelarangan pemakaian cadarnya.

Lebih lanjut Sakinah yang juga selaku sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat (PP WIA) sangat menyayangkan pernyataan Menteri Agama RI tersebut.

BANDA ACEH - Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin agar tidak menggaungkan isu radikalisme secara berlebihan sehingga menutupi sejumlah isu yang krusial dan harus mendapat perhatian lainnya.

"Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya kepada Serambinews.com, Selasa (29/10/2019).

Nasir melalui rilis yang diterima Serambinews.com menyampaikan tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi melahirkan radikalisme yang

Saya curiga isu radikalisme ini hanya ingin menutupi berbagai masalah bangsa yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,"

**H. M. NASIR DJAMIL,
S.Ag, M.Si**

Nasir Djamil Ingatkan Pemerintah tidak Berlebihan Gaungkan Isu Radikalisme

menjurus kepada gerakan teroris.

"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dan mengapa perilaku sosial menyimpang itu bisa terjadi," ujar Nasir.

Lebih lanjut politisi PKS ini menyampaikan, justru dirinya khawatir memunculkan isu radikalisme secara berlebihan sebagai upaya untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.

"Saya curiga isu radikalisme ini hanya ingin menutupi berbagai masalah bangsa yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya," tambah anggota DPR RI asal Aceh ini.

Saat ini, lanjut Nasir, ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.

Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahhnya mendapatkan air bersih bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau panjang, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.

"Kasihani rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer," pungkas Nasir. (*)



Anggota Fraksi PKS DPR RI H. M. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si Foto : Istimewa)

BERITA FOTO



Ansori Siregar dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi IX

Anggota Fraksi PKS H. Anshory Siregar, Lc dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dalam acara pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada Rabu 30 Oktober 2019. Nampak hadir kolega Ansori di Fraksi PKS dan Komisi IX, Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si. dan Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

Foto : Erwinsyah

PKS mengingatkan Kemenpar Ekraf agar segera menghadirkan peraturan turunan yang menjadi amanah Undang-undang ini sekaligus menyiapkan kebijakan program dan anggaran yang memadai.

**Hj. LEDIA HANIFA A,
S.Si., M.Psi.T**

Jakarta (24/10) — Menyambut kehadiran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari Kabinet Presiden Jokowi, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa menyampaikan harapannya.

“Industri Ekonomi Kreatif di negeri ini sedang berkembang pesat, Undang-undang yang memayunginya pun baru menetas pada akhir September lalu. Maka saya berharap di bawah payung Undang-undang tentang Ekonomi Kreatif ini Pak Menteri Wishnutama bisa membawa industri ekonomi kreatif Indonesia menjadi lebih gemilang di masa datang,” tandas Ledia.

Harapan ini tentunya tidak berlebihan, Ledia menambahkan Industri Ekonomi Kreatif

BERITA FRAKSI PKS

Fraksi.pks.id | Sabtu 26 Oktober 2019

f Fraksi PKS DPR RI

c fraksipksdprri

t @fpksdprri

fraksi.pks.id



DPR Harap Industri Kreatif Indonesia Lebih Gemilang

memang tengah menjadi primadona baru dalam geliat industri di tanah air. Tercatat Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi yang muncul dari ide maupun gagasan kreatif telah mencapai angka Rp 1.009 triliun pada 2017, meningkat dari tahun 2016 yang “hanya” Rp 922,59 triliun dan tahun 2015 yang “hanya” 852,54 Triliun.

“Hingga akhir 2018, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional diperkirakan mencapai Rp 1.105 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp 1.211 triliun pada 2019. Begitu pula jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekonomi kreatif pada 2016 tercatat meliputi 16,91 juta pekerja lalu meningkat menjadi 17,43 juta pekerja di tahun 2017” ungkap Ledia.

Ledia mengingatkan, persoalan yang ada selama ini di sektor industri kreatif adalah belum tampaknya pengayoman dan perlindungan yang maksimal kepada para produsen, pencipta serta karya ekonomi kreatif terutama dari sisi hukum. Misalnya saja, salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh para pelaku

industri ekonomi kreatif adalah ketiadaan penghargaan dan perlindungan atas hak cipta karya mereka.

Begitu pula peran dan tanggungjawab pemerintah serta pemerintah daerah selama ini belum terjabarkan secara definitif saat ekonomi kreatif masih ditangani satu badan negara.

“Industri ekonomi kreatif bermunculan dari berbagai pelosok negeri, sementara saat itu Badan Ekonomi Kreatif hanya berwenang melakukan perumusan kebijakan di level pusat dan tidak memiliki kewenangan untuk menata dan mengelola perkembangan ekonomi kreatif secara lebih teknis.” Papar Ledia

Karenanya kehadiran Undang-undang ini diharapkan dapat memutus rantai masalah dan menghadirkan ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menjaga, memelihara sekaligus memajukan produk ekonomi kreatif Indonesia agar bersinar mulai dari negeri sendiri hingga ke mancanegara.

Untuk mengimplemmentasikan mimpi besar tersebut, aleg dari Fraksi PKS ini mengingatkan kementerian Pariwisata dan



Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T (Foto : Ardian/Humas FPKS)

Ekonomi Kreatif agar segera menghadirkan peraturan turunan yang menjadi amanah Undang-undang ini sekaligus menyiapkan kebijakan program dan anggaran yang memadai.

“Sebab, tanpa adanya peraturan turunan yang menjadi amanah Undang-undang serta menyiapkan kebijakan program

dan anggaran yang memadai untuk menata, menggerakkan, dan memajukan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, kehadiran Undang-undang Ekonomi Kreatif tidak bisa diimplemmentasikan secara maksimal dan hanya menjadi hiasan regulasi.” tutupnya.

Khusus untuk utang luar negeri, Pemerintah dan Bank Indonsia harus meningkatkan koordinasi, terutama dengan semakin tingginya ketidakpastian perekonomian global.

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Jakarta (29/10) — Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharram, mengkritik rencana Pemerintah untuk menambah utang baru, di fase awal Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'rif.

Ecky mengatakan Pemerintah perlu berhati-hati dalam manajemen utang, terutama ada wacana Pemerintah untuk menambah utang lagi, dimana utang yang ada semakin melonjak, defisit berdasarkan APBN 2020 ditargetkan mencapai Rp307,2 Triliun, meningkat apabila dibandingkan dengan target APBN 2019 Rp 297 Triliun.

"Utang yang terus menumpuk dan tidak dikelola

Waspadai Bahaya Laten Hutang Baru Pemerintah

dengan baik justru dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta membuat ekonomi Indonesia rentan akan external shock". Ujar Ecky.

Ketergantungan Indonesia akan utang ini lanjut Ecky merupakan salah satu yang disebabkan oleh besarnya shortfall perpajakan, sehingga diperkirakan pada tahun 2019 saja akan terjadi shortfall sebesar Rp 143 triliun. Itulah yang membuat Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi pendapatan melalui perpajakan.

"Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya hanya sebesar 5,73 persen, sangat jauh apabila dibandingkan pertumbuhan pada periode 2005-2009 yang mencapai 17,56 persen per tahun" tuturnya.

Ecky juga menyoroti bahwa selama pemerintahan Jokowi dari 2015-2018, stok utang pemerintah dalam bentuk SBN bertambah Rp 1600 triliun. Hal tersebut yang membuat defisit APBN selama ini masih bersifat tidak produktif, karena masih tingginya alokasi anggaran belanja yang tidak efisien serta



Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi Keuangan H. Ecky Awal Mucharam (Foto Gilang)

potensi kebocoran berbagai belanja lainnya yang masih tinggi.

"Oleh sebab itu, Pemerintah kedepan perlu merubah paradigma dalam pembiayaan defisit dan pengelolaan utang negara, agar tidak mempengaruhi kondisi perekonomian negara kita" tambah Ecky.

Lebih Lanjut Ecky menambahkan Pemerintah dan Bank Indonesia harus mewaspadai tren meningkatnya rasio utang Pemerintah dan utang luar

tren tersebut menunjukkan sinyal yang kurang baik atas perekonomian Indonesia." Ungkap Ecky

Khusus untuk utang luar negeri, Ecky menegaskan Pemerintah dan Bank Indonsia harus meningkatkan koordinasi, terutama dengan semakin tingginya ketidakpastian perekonomian global. Perekonomian Amerika Serikat yang mulai menunjukkan perbaikan membuat The Fed kembali berencana meningkatkan tingkat suku bunga selama bertahap selama tahun 2018.

"Kenaikan tersebut dapat menimbulkan capital outflow dan salah satu dampak awalnya adalah pada nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah tentu akan memukul sektor swasta yang memiliki utang luar negeri karena beban utang mereka otomatis akan meningkat" tutur Ecky.

Ecky memperingatkan resiko kurs tersebut harus diperhatikan, terlebih tren rasio utang luar negeri Indonesia terhadap GDP terus meningkat setiap tahunnya, dari 32,95% (2014) menjadi 36.8% (2019).

negeri Indonesia di tahun 2019. Debt to GDP ratio Indonesia mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir, dari 24% pada tahun 2014 hingga mendekati 30% di tahun 2019.

"Tren meningkatnya debt to gdp ratio ini menunjukkan bahwa utang yang dilakukan relatif kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal serupa terjadi pada debt to service ratio Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari 23.95% (2014) menjadi 26.18% (2019),

Mahasiswa harus punya *skill* dan keterampilan dalam berwirausaha, dari yang kecil-kecil saja dulu hingga nanti berkembang dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan punya kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional

Junaidi Auly Ajak Mahasiswa Berwirausaha

Junaidi memberikan motivasi dalam acara Festival Edukasi Bank Indonesia (FesKaBI) di Universitas Lampung (29/10/2019).

Data BPS 2016 mengatakan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia meningkat menjadi 3,10 persen yang sebelumnya hanya 1,67 persen. Tetapi, jumlah ini masih kalah dengan jumlah wirausaha di negara tetangga seperti Malaysia yg berjumlah 6 persen dari total penduduknya, Singapura 7 persen dan Thailand 5 persen.

"Dari data diatas, kami mendorong pemerintah untuk terus melahirkan pengusaha muda baru yang bisa disinergikan dengan perguruan tinggi yang bisa menciptakan SDM yang unggul dalam wirausaha dan meningkatkan daya saing di era global sekarang ini," ungkap legislator PKS ini.

Lebih lanjut, Anggota dengan sapaan akrab Bang Jun ini berharap wirausaha muda kita harus terus update dengan teknologi dan informasi yang terus berkembang untuk bisa melakukan inovasi dan ide-ide kreatif dalam usahanya sehingga tidak ketinggalan



Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung Ir. H. Junaidi Auly, MM

zaman. Dalam hal ini, Bank Indonesia meluncurkan QRIS untuk memudahkan segala pembayaran kebutuhan wirausaha.

"Dengan pemanfaatan

QRIS yang diprogramkan oleh BI, harapannya wirausaha muda bisa mendorong efisiensi dalam aktifitas bisnisnya sehingga bisa menyokong kemajuan usaha dan berimbang terhadap pertum-

buhan ekonomi nasional," tutup kandidat Doktor IPDN ini.

Ir. H. JUNAIDI AULY, MM

Lampung (29/10) — Anggota DPR RI asal Lampung Junaidi Auly mengajak mahasiswa Universitas Lampung (UNILA) untuk berwirausaha dari sekarang demi mencetak pengusaha muda yang unggul dan berjiwa sosial. Menurutna, perguruan tinggi harus mempersiapkan lulusannya untuk menciptakan lapangan kerja baru.

"Mahasiswa harus punya skill dan keterampilan dalam berwirausaha, dari yang kecil-kecil saja dulu hingga nanti berkembang dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan punya kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," ujar

BERITA FOTO



Dr. Abdul Fikri Faqih dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi X

Anggota Fraksi PKS Dr. Abdul Fikri Fakhri, MM dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi X oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada Rabu 30 Oktober 2019. Turut hadir dalam acara pelantikan Sekretaris Fraksi PKS Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T serta anggota Fraksi PKS yang juga anggota Komisi X DPR RI Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag.



Foto :
Erwinsyah, Ledia Hanifa



FRAKSI PKS DPR RI

1 Kursi Ketua dan Enam Wakil Ketua di AKD DPR RI

Hasil rapat dengan DPP PKS dibawa dalam forum rapat pleno FPKS, Selasa pagi. Kemudian hasil rapat tersebut diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa sore. Kami siap kerja keras, dan semua anggota sudah lengkap

Dr. JAZULI JUWAINI, MA

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengonfirmasi bahwa fraksinya memperoleh satu kursi ketua dan enam wakil ketua di alat kelengkapan dewan (AKD).

FPKS akan mendapatkan kursi ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), wakil ketua Komisi I DPR, wakil ketua Komisi IX DPR RI, wakil ketua Komisi X DPR RI, wakil ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

"Pimpinan FPKS DPR RI dipanggil DPP PKS untuk mendiskusikan terkait dengan pimpinan di AKD, dan sudah kami tetapkan," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).

Menurut dia, hasil rapat dengan DPP PKS dibawa dalam forum rapat pleno FPKS, Selasa pagi. Kemudian hasil rapat tersebut diserahkan ke

Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa sore. "Kami siap kerja keras, dan semua anggota sudah lengkap," ujarnya.

Menurut dia, FPKS telah menempatkan anggotanya di kursi-kursi pimpinan AKD, yaitu Habib Aboe Bakar Al Habsy sebagai ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Abdul Kharis Almasyari sebagai wakil ketua Komisi I DPR.

Ansori Siregar menjadi wakil ketua Komisi IX DPR RI, Fikri Faqih sebagai wakil ketua Komisi X DPR RI, Mardani Ali Sera sebagai wakil ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Dimiyati Natakusumah sebagai wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Akhmad Syaikhu sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

KOMPOSISI ANGGOTA FRAKSI PKS DALAM ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) DPR RI



**KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD),
Habib ABOE BAKAR ALHABSY**



**WAKIL KETUA KOMISI I
Dr. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE. M.Si, Akt**



**WAKIL KETUA KOMISI IX
H. ANSHORY SIREGAR, Lc**



**WAKIL KETUA KOMISI X
Dr. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**



**WAKIL KETUA BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP),
Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng**



**WAKIL KETUA BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT),
Dr. H.R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH**



**WAKIL KETUA BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)
AHMAD SYAIKHU**

Jakarta (1/11) Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsyi ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Penugasan ini merupakan amanah yang luar biasa berat, tentu tidak mudah dan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terlebih peran MKD adalah menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat" disampaikan oleh Aboe Bakar Al Habsyi sesuai pelantikan sebagai ketua MKD DPR RI (31/10) di Komplek Parlemen.

Aboe mengajak semua Anggota DPR RI menegakan nilai-nilai luhur dan etos kerja yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya, karena sejatinya mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan

Anggota DPR RI sebagai pejabat publik secara prinsip terikat kepada norma-norma hukum dan etika publik. Melekat keistimewaan hak di satu sisi, namun juga memiliki kewajiban standar moral disisi yang lain

**HABIB ABOE BAKAR
ALHABSYI**

BERITA FRAKSI PKS

Fraksi.pks.id | Jum'at 01 November 2019

Fraksi PKS DPR RI | Fraksi.pks.id | @fpksdprri



Jadi Ketua MKD, Aboe Bakar Ajak Jaga Marwah Parlemen

rakyat. Setiap langkah dan tindakan akan menjadi perhatian publik, semoga sikap keteladanan dan inspirasi menjadi bagian dasar dalam kerja-kerja di Parlemen.

"Anggota DPR RI sebagai pejabat publik secara prinsip terikat kepada norma-norma hukum dan etika publik. Melekat keistimewaan hak di satu sisi, namun juga memiliki kewajiban standar moral disisi yang lain"

Proses penegakan marwah dan kehormatan DPR RI sejatinya tidak bisa dibebankan kepada orang per orang, pun juga kepada sebuah lembaga an sich. Perlu dukungan seluruh elemen dan komponen yang ada di dalamnya.

Aboe Bakar menyampaikan setidaknya ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kelembagaan MKD ini. "Pertama, kita harus terus mensosialisasikan keberadaan MKD ini kepada masyarakat. Agar mereka tahu fungsi dan peran MKD. Sehingga mereka akan dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPR RI".



Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi

terang Aboe Bakar.

"Kedua, memperluas akses pelaporan pelanggaran etik. Yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan jika didapati ada indikasi pelanggaran etik oleh anggota. Hal ini termasuk mengenai persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk membuat laporan. Sehingga masyarakat akan benar-benar paham mengenai mekanisme pelaporan, maupun persyaratan yang diperlukan. Sehingga laporan yang dibuat bukan asal-asalan ataupun cenderung bersifat asumsi bahkan fitnah

semata." lanjut Wakil Ketua Bidang DPP PKS tersebut.

Selanjutnya menurut Aboe Bakar diperlukan penguatan dan penyempurnaan mekanisme internal. "Hal ini merupakan peningkatan daya dukung penerimaan perkara dan pemrosesan perkara di internal MKD. Termasuk penguatan dan perbaikan SOP di internal. Sehingga dalam setiap perkara yang masuk akan dapat diproses sesuai dengan ketentuan, termasuk untuk menjaga kerahasiaan dokumen." terang bendahara Fraksi PKS tersebut.

Menurutnya Perbaikan ini diperlukan untuk mencegah terjadi kebocoran laporan ataupun dokumen lainnya, yang ditujukan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"InsyaAllah jika kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan secara tekun terus berproses menegakan standar yang lebih baik, sebuah keniscayaan rakyat akan lebih percaya dalam menyalurkan berbagai aspirasi ke DPR RI" pungkas Aboe.

BERITA FOTO



Dr. Abdul Kharis dilantik Sebagai Pimpinan Komisi I

Anggota Fraksi PKS Dr. Abdul Kharis Almasyhari, SE. M.Si.Akt dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dalam acara pelantikan yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa, 29 Oktober 2019.

Nampak hadir dalam acara ini Ketua Fraksi PKS Dr. H. Jazuli Juwaini, MA dan Wakil Ketua Fraksi PKS Dr. H. Sukamta. Keduanya merupakan kolega Abdul Kharis di Komisi I DPR RI

Foto : Twitter dpr_RI



Program desa binaan juga respons dari harapan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Keduanya meminta kepada aleg terpilih untuk membuat desa-desa binaan di dapilnya

AHMAD SYAIKHU

Kunjungi Dapil, Ahmad Syaikhul Ajak Aleg PKS Buat Desa Binaan

Jakarta (26/10) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul mengajak seluruh Anggota Legislatif (aleg) DPRD Provinsi Jawa Barat,

Dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta membuat desa binaan.

Hal itu Ahmad Syaikhul sampaikan saat melakukan kunjungan di tiga wilayah tersebut yang merupakan daerah pemilihannya, yakni Dapil 7 Jawa Barat, Sabtu (26/10).

"Ini tanggungjawab kita dari PKS untuk memelihara konstituen yang ada," ujar Cawagub DKI Jakarta itu.

Syaikhul melanjutkan, program desa binaan juga respons dari harapan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Keduanya meminta kepada aleg terpilih untuk membuat desa-desa binaan di dapilnya.

"Ini respons atas harapan Habib Salim dan Pak Sohibul Iman," ungkap Ketua DPW PKS Jawa Barat itu.

Syaikhul berharap, usai

pertemuan para anggota legislatif melakukan survei desa mana saja yang bakal menjadi proyek percontohan. Desa binaan tersebut harus mempertimbangkan potensi daerah.

"Potensi ini juga nantinya harus juga dipadukan dengan pangsa pasarnya, yaitu kaitan dengan pemasaran yang ada di daerah masing-masing. Agar perekonomian di desa tersebut dapat berjalan," jelasnya.

Untuk mewujudkan desa binaan, tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan pihak lain seperti BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) nya.

"Kalau konsepnya jelas, pemberdayaan ekonominya jelas, pemberdayaan lingkungannya jelas, saya yakin kita akan disupport oleh berbagai pihak," ujar Syaikhul.



NTT KLAIM BLOK MASELA

Saadiah Uluputty: Kami Minta Pemerintah Buka Peta

“Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat

**SAADIAH
ULUPUTTY, ST**

Jakarta (29/10) — Beberapa hari ini, mencuat informasi tentang klaim Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap 5 % Participating Interest (PI) Blok Masela.

Gubernur NTT, Victor Laikodat menyatakan Presiden Jokowi telah menyetujui pembagian keuntungan dari pengembangan gas bumi Blok Masela sebanyak 5 % kepada NTT.

Hal ini menimbulkan reaksi dari tokoh dan

masyarakat Maluku di daerah. Beragam komentar dan perdebatan muncul mulai dari ruang-ruang diskusi hingga media sosial. Bahkan masyarakat Maluku menunjukkan protesnya dengan melakukan demonstrasi menyambut kedatangan Jokowi di Ambon, Senin (28/10/2019) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty meminta Pemerintah Pusat transparan mengenai Blok Masela. Hal itu disampaikan Uluputty, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/10/2019) kemarin.

“Kami minta Pemerintah membuka peta konsesi wilayah yang ada dalam Plan Of Development (PoD). Jika PoD dibuka, akan diketahui dengan jelas posisi geografis blok Masela. Publik mesti tahu Blok Masela masuk di wilayah administrasi mana, agar tidak muncul klaim-klaim yang tidak berdasar,” jelasnya.

Uluputty menambahkan, Presiden Jokowi harus memberikan klarifikasi terhadap persoalan tersebut.

Lambatnya respon dari pemerintah dapat menimbulkan dampak disharmonisasi masyarakat.

“Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah wajib memberikan penegasan tentang posisi Blok Masela dari segi wilayah administratif, sehingga menjadi kepastian yang tidak memantik perdebatan.

“Pendekatan yang dipakai ialah pasal 4 huruf C Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016. Participating Interest (PI) 10 % diberikan kepada lebih dari satu provinsi apabila posisi bloknya masuk dalam wilayah administrasi lebih dari satu provinsi. Jadi kata kuncinya adalah wilayah administrasi,” tegasnya.



SAADIAH ULUPUTTY, ST, Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku (Foto : Istimewa)

Semua tergantung kaum laki-lakinya bersedia memberikan kesempatan bagi perempuan dan bagaimana juga perempuan mampu membangun kualitas demokrasi yang ditandai dengan keseimbangan peran gender dalam pengambilan keputusan politik”

HJ. NEVI ZUAIRINA

Padang (29/10) — Anggota DPR RI Nevi Zuirina mengatakan kaum perempuan dapat lebih idealis untuk terjun di dunia politik, ketika kaum perempuan mendapat karpet merah dari kaum laki-laki dalam ruang publik. Hal ini disampaikan pada seminar sosialisasi peran perempuan dalam pengawasan pemilu di Padang, Sumatera Barat.

Legislator asal PKS ini berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat serta merta menjadi anggota dewan memikirkan gaji atau take home pay. Ia lebih independent manakala didukung oleh suaminya, tidak memikirkan kebutuhan untuk keluarganya karena kebutuhan itu dipenuhi

Sepak Terjang Legislator Perempuan di Parlemen

oleh suaminya. Inilah yang membuat keyakinannya terbentuk, bahwa seorang perempuan di parlemen, secara fitrah tidak mungkin menjadi korup akibat memikirkan harta kekayaan.

“Sepanjang seorang perempuan ketika berkiprah di parlemen dan mendapat dukungan penuh dari suaminya, jiwa perempuannya akan terbangun sehingga dunia politik lebih halus yang pada akhirnya di parlemen atau di legislatif menjadi institusi ramah pada perempuan. Keadaan ini akan berlaku juga bila kaum lelaki yang juga duduk di parlemen memberikan kehormatan penuh pada perempuan di parlemen”, ujar nevi.

Nevi mengatakan, seperti pada pepatah-pepatah yang sudah berlaku secara umum bahwa dibalik lelak hebat, ada peran perempuan hebat di belakangnya. Untuk itu, para lelaki hebat perlu memberikan ruang yang lebih luas untuk kaum perempuan yang mendukungnya terutama di ranah publik .

Keterwakilan Perempuan di Parlemen di DPR RI dari masa- kemasa, Lanjut Nevi, sudah menunjukkan

peningkatan keterpilihannya sejak tahun 2004 hingga 2019. Tahun 2004 Caleg Perempuan terpilih 61 orang (11%). Pada tahun 2009 meningkat menjadi 18% atau 110 orang yang terpilih. Pada tahun 2014 menurun sedikit dari tahun 2009 menjadi 17,3 % atau 97 orang. Dan terakhir pada tahun 2019, Caleg Perempuan terpilih 118 orang (20,5%) meningkat dari tahun 2014.

Pada pemilu periode ini yang baru saja berlalu, pemerintah dan DPR melalui regulasi resmi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah memberi ruang pada kaum perempuan untuk berperan pada berbagai partisipasi politik seperti Keterlibatan perempuan dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu ; Keterlibatan perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik ; Keterlibatan perempuan dalam menyelenggarakan pemilu ; Keterlibatan perempuan dalam lembaga publik.

“Banyak Perempuan berada dalam Lembaga publik bukan hanya sebagai anggota dewan atau Menteri. Penyelenggara dan pengawas pemilu pun ada pos-pos komisierinya



Anggota DPR RI Dapil Sumbar Hj. Nevi Zuirina, dalam kegiatan Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu Provinsi Sumatera Barat di Hotel Grand Inna Muara Padang. (Foto : Istimewa)

adalah perempuan baik tingkat pusat maupun daerah. Bahkan sejara perkembangan peradaban Indonesia pun banyak diisi oleh kaum perempuan mulai dari Ratu Shima, Nyak Dien, Kartini hingga Megawati Sukarno Putri. Bahkan Ketua DPR RI Sekarang dipikul oleh seorang perempuan yakni Puan Maharani”, jelas Nevi.

Upaya Meningkatkan Peran Perempuan dalam Politik & Pembangunan, dimulai dengan disahkannya UU 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan. Dan khusus di parlemen, payung hukum

dukungan bagi perempuan untuk diterima di Lembaga legislatif adalah UU 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ; UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD & DPRD ; UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD & DPRD dan terakhir UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Intinya semua tergantung kaum laki-lakinya bersedia memberikan kesempatan bagi perempuan dan bagaimana juga perempuan mampu membangun kualitas demokrasi yang ditandai dengan keseimbangan peran gender dalam pengambilan keputusan politik”, tutup Nevi Zuirina.

JANGAN HANYA PENCITRAAN,

Kunjungan Jokowi ke Sulawesi Tengah Harus Maksimal

Pemerintahan sekarang harus lebih fokus menangani pemulihan daerah-daerah yang tertimpa musibah khusus Su-lawesi Tengah, bukan ribut membahas radikalisme, masih banyak rakyat kita yang perlu perhatian khusus oleh pemerintah pusat

Sulawesi Tengah (30/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah Sakinah Al-Jufri mulai mengawal kinerja pemerintah khususnya persoalan bantuan bencana gempa, liquifaksi, dan tsunami dan baru saja mengunjungi wilayah-wilayah yang tertimpa musibah khususnya Sulawesi Tengah.

Sakinah menuturkan kunjungan Jokowi pada Selasa 29/10/2019 diharapkan bisa memaksimalkan bantuan nagara khususnya hunian tetap, yang sampai saat ini masih belum maksimal dan merata.

"Saya melihat ada 126 kk

yang terdaftar di wilayah Masjid Baiturrahim (Masjid agung palu) namun hanya 4 kk saja yang mendapatkan bantuan huntara, sisanya masih bertahan di halaman Masjid Baiturrahim, Semoga kedatangan Presiden Jokowi menjadi angin segar dalam percepatan recovery masyarakat korban gempa, tsunami dan liquifaksi" ujar Sakinah.

Sudah setahun lebih Lanjut Sakinah Sulawesi Tengah tertimpa benca pada 28 September 2018, bantuan silih berganti namun masih saja banyak rakyat yang tinggal di tenda-tenda sehingga menjadi

perhatian khusus anggota dewan.

Menurut Sakinah Proses pemilihan kota dan beberapa kabupaten yang tertimba bencana saat itu terus dilakukan, demi kepentingan Rakyat Sulawesi Tengah.

"Pemerintah Jokowi-Ma'ruf harus lebih maksimal, sudah setahun lebih masih saja Ada yang tinggal di tenda-tenda, Saya kasihan bagaimana dengan keluarga yang masih memiliki bayi ataupun Lansia yang masih menetap ditenda apakah ini tidak menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, rakyat Sulawesi

Tengah harus disediakan tempat tinggal dan pekerjaan bukan isu-isu radikalisme" Tururnya

"Pemerintahan sekarang harus lebih fokus menangani pemulihan daerah-daerah yang tertimpa musibah khusus Sulawesi Tengah, bukan ribut membahas radikalisme, masih banyak rakyat kita yang perlu perhatian khusus oleh pemerintah pusat". Tutup Sakinah



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sulawesi Tengah



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI

fraksi.pks.id